



Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi di Indonesia

Ribka Sri Rezeki Simanjutak

Universitas Negeri Semarang

Rian Rambu Raya

Universitas Negeri Semarang

Rizal Al Birra

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: ribkasimanjuntak068@gmail.com

***Abstract.** This research aims to analyze the influence of political parties on the development of democracy in Indonesia. Indonesian democracy, as a country with a long history of political dynamics, is greatly influenced by the role and performance of political parties. This research uses a quantitative approach with a literature review method to examine various aspects, including the function of political parties in the election process, public policy formation, and their contributions to supporting or hindering the democratization process. The results show that political parties play a crucial role in strengthening democratic institutions through political representation and public participation. However, the findings also indicate signs of fraud and dishonesty by political parties in submitting LADK improvements to the KPU, and weak cadre formation that can hinder the development of democracy. This research concludes that to strengthen democracy in Indonesia, political party reforms are needed, focusing on transparency, accountability, and the enhancement of inclusive political participation.*

***Keywords:** Influence of Political Parties, Democratic Development, Political Dynamics, Role of Political Parties, Performance of Political Parties*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partai politik terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik, sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kepustakaan untuk mengkaji berbagai aspek yang mencakup fungsi partai politik dalam proses pemilihan umum, pembentukan kebijakan publik, serta kontribusi mereka dalam mendukung atau menghambat proses demokratisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki peran krusial dalam memperkuat institusi demokrasi melalui representasi politik dan partisipasi masyarakat. Namun, temuan juga

Received April 30, 2024; Revised Mei 31, 2024; Juni 10, 2024

**Corresponding author, e-mail address*

mengindikasikan adanya indikasi kecurangan dan ketidakjujuran partai politik dalam mengajukan perbaikan LADK kepada KPU, dan lemahnya kaderisasi yang dapat menghambat perkembangan demokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memperkokoh demokrasi di Indonesia, diperlukan reformasi partai politik yang fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan partisipasi politik yang inklusif.

Kata Kunci: Pengaruh Partai Politik, Pembangunan Demokrasi, Dinamika Politik, Peran Partai Politik, Kinerja Partai Politik

LATAR BELAKANG

Demokrasi menurut pandangan David Beetham dan Kevin Boyle merupakan sebuah wujud keinginan keseluruhan orang mengartikan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama dan menjadikan demokrasi sebuah indikator mengenai prinsip tentang kendali rakyat dan kesetaraan politik yang dimana wujud dari partisipasi rakyat tersebut dalam mengambil sebuah keputusan kolektif. Aristoteles juga berpandangan mengenai negara demokrasi yang harus mendahulukan kebebasan yang artinya mayoritas mempunyai kekuasaan tertinggi dan apapun yang disetujui oleh mayoritas harus menjadikan sebuah tujuan¹. Hal ini menjadikan bahwa kebebasan menjadikan sebuah kemajuan begitupun halnya dengan kebebasan politik semakin mudah diciptakan dengan adanya sebuah jaminan keseimbangan pemerintah, perubahan, dan keadilan sosial. Demokrasi inilah menjadi sebuah keyakinan bahwasannya sebagai mekanisme politik yang melindungi kebebasan masyarakat dengan memberikan suatu tugas kepada pemerintah untuk melindungi hal itu. Dan hal ini lah yang harus dijunjung tinggi yaitu demokrasi yang dimana rakyat mendapatkan kebebasannya sebagai orang yang memegang kedaulatan.

Partai politik sendiri suatu keharusan yang ada dalam politik demokrasi modern. Yang dimana ini juga sesuai dengan pengertian dari partai politik itu sendiri, Parpol menurut pendapat Mark N. Hugopian sendiri merupakan suatu kelompok yang dibuat dengan mempunyai tujuan untuk melakukan perubahan dalam bentuk dan karakter terhadap suatu kebijakan publik dengan prinsip kepentingan suatu ideologis tertentu melalui kekuasaan atau peran masyarakat dalam pemilihan.² Bisa dikatakan juga bahwa partai politik sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan kekuasaan. Di partai politik sendiri sebenarnya mempunyai suatu tujuan dan fungsi menurut pandangan dari gaffar

¹Hj. Naafisah Didah D, *Teori-Teori Demokrasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 21-22

²Fadjar Abdul M, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia* (Malang: Setara Press, 2012), hal. 12-14

dan amal berpandangan peranan dari sebuah parpol sendiri untuk:

- a. memberikan pemahaman politik
- b. tempat merekrut calon pejabat publik dalam berbagai posisi dalam memimpin jalannya negara.
- c. Sebagai tempat yang mewakili kepentingan suatu masyarakat.
- d. Yang menghubungkan antara penguasa dan rakyat

Berbeda halnya dengan James Rosnau dia berpandangan bahwa fungsi dari partai politik itu sendiri untuk menghubungkan kepentingan yang ada dalam suatu sistem politik. Menurut pandangannya ada dua peran penting dalam parpol itu sendiri:

- a. Sebagai Lembaga yang berperan dalam proses pembentukan kebijakan negara
- b. Dan sebagai Lembaga yang mempunyai peran untuk memberikan suatu reaksi terhadap kebijakan negara

Negara yang menerapkan demokrasi modern mempunyai fungsi parpol secara umum, yaitu³:

- a. Sebagai tempat melakukan komunikasi politik, yang dimana di pihak yang satu mereka harus bisa menjadi saluran kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah dan disisi lain menjadi pihak untuk menjelaskan kebijakan pemerintahan kepada masyarakat
- b. Mensosialisasikan politik atau sering juga disebut dengan Pendidikan politik yaitu memberitahu dan menanamkan nilai-nilai ideologi.
- c. Tempat merekrut politik yaitu dimana partai mencari dan mengajak orang yang mempunyai kemampuan di bidangnya supaya bisa berpartisipasi dalam proses politik dan menjadikan salah satu cara dari penyeleksian untuk pemimpin partai maupun yang akan memimpin negara.
- d. Sebagai tempat untuk mengatur konflik, kita tahu bahwa negara yang menganut demokrasi yang masyarakatnya bebas terbuka maka akan timbul perbedaan atau persaingan suatu pendapat atau pandangan dan itu sangatlah wajar terjadi. Oleh karena itu hal ini haruslah bisa dikendalikan supaya tidak berkepanjangan sehingga bisa membahayakan eksistensi negara maka dari itu partai politik dibutuhkan untuk tidak menimbulkan konflik seminimal mungkin.

Partai politik dalam kehidupan negara Indonesia merupakan hal yang baru. awal muncul parpol sendiri pada era kolonial sekitar abad 20 an. Suatu kelompok dalam partai tersebut muncul dengan tumbuhnya kesadaran kebangsaan dan pencarian sebuah identitas nasional oleh lapisan elite baru yang berasal dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901.yang dinamakan *etische politiek* yang memberikan kepada bumiputera

³ibid. hal.18

untuk bisa mendapatkan Pendidikan lebih dari Pendidikan dasar. Pada era kolonial sendiri, partai-partai dibentuk untuk mencari identitas nasional di satu pihak dan memperjuangkan kemerdekaan dilain pihak. Sehingga ideologi-ideologi seperti islamisme, nasionalisme, dan marxisme yang menjadi dasar pembentukan sebuah partai pada era kebangkitan nasional. Meskipun dibuat untuk wadah aspirasi dari suatu golongan ideologi yang berbeda, partai-partai pada era tersebut memberikan sebuah kontribusi untuk penemuan identitas keindonesiaan yang menjadikan dasar Republik. Tokoh- tokohnya adalah HOS Tjokroaminoto⁴, Tjpto Mangkusumo, Sukarno, dan Hatta mereka adalah sebagai pendiri dan pemimpin partai.

Kontribusi partai bagi masyarakat dan negara justru sangat penting setelah era Merdeka. Secara konvensional, pada masa sebelum Orde baru soeharto runtuh itu dibagi menjadi tiga periode, yaitu Demokrasi Parlementer (1949—1959), Demokrasi Terpimpin (1959—1965), dan Orde Baru (1966—1998). Periode ini yang menjadikan sebuah Gambaran peran partai dalam Sejarah Indonesia modern. Pada saat Demokrasi Parlementer merupakan periode awal percobaan demokrasi dengan Tingkat kehidupan dari partai yang tinggi, atau juga dikenal dengan masa pemerintahan partai-partai. Sedangkan Demokrasi Terpimpin Sukarno dan Orde Baru Soeharto memperlihatkan pada masa pemerintahan yang otoriter ditandai dengan kurangnya peranan dari partai-partai dan meningkatnya peranan dari militer. Pada masa otoriter-militer soeharto selama 32 tahun, partai-partai yang ada sendiri condong dilihat sebagai musuh negara dan menjadi penyebab konflik dan ketidakstabilan politik. Menurut dari pandangan Herbert Feith dalam tulisannya menjelaskan , partai merupakan aktor utama dalam sistem politik Demokrasi Parlementer. Prestasi penting dalam Demokrasi Parlemen adalah diadakannya pemilu pada tahun 1955, suatu pemilu pertama sejak Indonesia Merdeka yang diikuti oleh lebih dari 100 partai, organisasi, dan perorangan didalam sistem proporsional. Namun hanya ada 28 partai, organisasi, dan perorangan yang mendapatkan kursi di DPR.

Pemilu yang diadakan tahun 1955 menjadi sebuah harapan untuk bisa menyelesaikan krisis politik nasional ,tetapi harapan ini gagal diwujudkan. Tekanan dari Presiden Sukarno Dan militer yang menjadikan terhentinya sistem parlementer dan membuat Indonesia menjadi era otoriterisme dibawah Demokrasi Terpimpin dan Orde baru Soeharto. Sama halnya dengan masa Sukarno pada masa Suharto pada tahun 1973 melakukan sebuah fusi atas partai-partai PKI yang sudah dilarang pasca pemberontakan pada tahun 1965, yang menjadikan sebuah partai untuk mesin politik soeharto dan

⁴Haris Syamsuddin, *Partai, Pemilu, dan Parlemen* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014) hal. 20-21

melestarikan sistem otoriter yang bertekanan pada kekuatan militer, birokrasi, dan para pengusaha kroni Orde Baru⁵.

KAJIAN TEORITIS

Pada masa Reformasi pasca-Soeharto ada partai-partai baru yang muncul dengan semangat ideologis yang tinggi. Partai-partai dengan aliran Islam dan partai-partai beraliran nasionalis, sosialis, dan Kristen yang muncul pada tahun 1955 dan kembali lagi menjelang pemilu tahun 1999 dan pemilu 2004. Partai yang baru dan muncul kembali menjelang pemilu masa Reformasi dibentuk oleh para elite politik di Jakarta. Yang dimana hal ini sesuai dengan UU kepartaian yang memperbolehkan partai politik bersifat nasionalis. Dengan konsep demokrasi dan partai politik itu sendiri menjadikan sebuah parpol itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pembangunan demokrasi di Indonesia yang dimana sesuai dengan fungsi dan peranannya. Terlebih lagi parpol mempunyai peranan dalam kepemimpinan negara, supaya tidak terjadinya lagi sebuah negara yang dipimpin dengan kekuasaan otoriter di masa sekarang.

Oleh karena itu dengan bagaimana fungsi dan tujuan dari parpol itu sendiri bahwasannya mereka adalah satu Lembaga yang cukup mempengaruhi jalannya demokrasi yang sedang terbangun di Indonesia, jika kita melihat masih banyak parpol yang kurang merasakan bahwa pentingnya mereka dalam mempengaruhi jalannya demokrasi masih banyak dari mereka yang hanya memperhatikan masyarakat sebagai sumber pemilih mereka untuk mendapatkan suatu kepentingan dan kekuasaan tersebut dari sanalah kami menganalisis bagaimana suatu pengaruh partai politik terhadap jalannya demokrasi dan bagaimana yang sedang terjadi di dalam negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yang fokus utamanya bersumber dari jurnal ilmiah, artikel serta buku yang relevan dengan penelitian ini. Dengan pendekatan ini data yang dikumpulkan akan di analisis, identifikasi, telaah, interpretasi guna menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang subjek yang diteliti agar dikemudian dapat disajikan secara deskriptif analitis

⁵ibid hal.22-24

HASIL DAN PEMBAHASAN

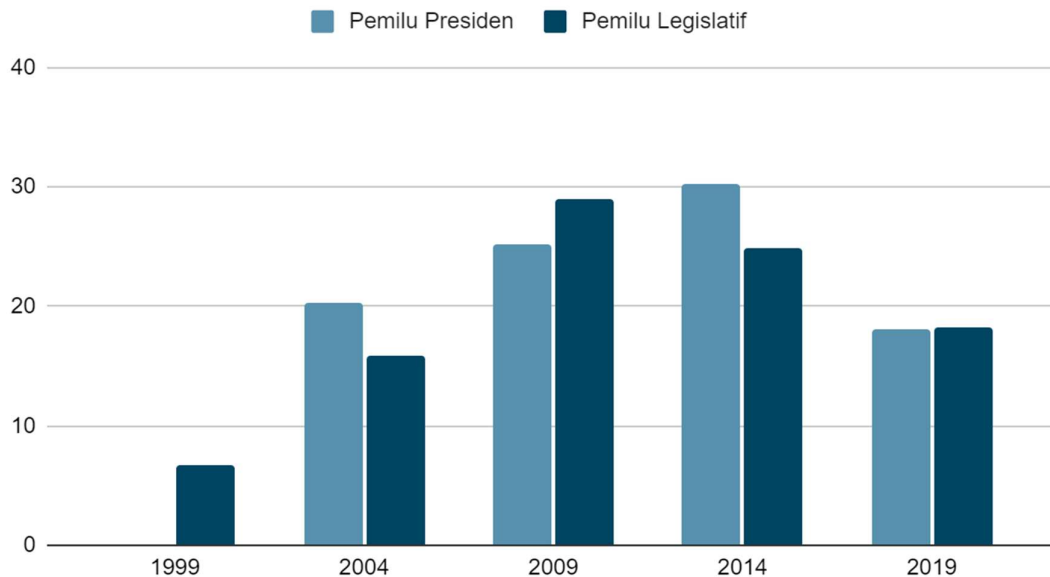
Partai Politik dan Partisipasi Pemilih

Pemilihan umum merupakan sebagai salah satu bentuk dari terwujudnya negara demokrasi yang dimana masyarakat mempunyai suatu hak pilih untuk memilih pemimpin dan wakil yang akan memimpin suatu jalannya pemerintahan dan konstitusi dan diwakilkannya suatu suara hak mereka oleh karena itu sangat penting Ketika pengimplementasian dalam demokrasi itu sendiri dari sini jugalah partai politik sebagai penggerak untuk memobilisasi masyarakat turut serta dalam pemilihan bukan hanya sekedar mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan mereka tetapi mereka juga harus mempersiapkan calon-calon pemimpin negara yang diwakilkan melalui partai mereka yang mempunyai integritas tinggi, cinta negara oleh karena itu dalam perwujudan demokrasi dalam pemilu penulis menyajikan sebuah data bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan dari tahun 1999—2019⁶:

Tahun	Persentase Pemilu Presiden yang tidak memilih	Persentase Pemilu Legislatif Yang tidak memilih
1999	Sistem perwakilan suara MPR	6,7
2004	20,24	15,93
2009	25,19	29,01
2014	30,22	24,89
2019	18,03	18,31

⁶ " 'Golongan Putih' di Pemilu dari Masa ke Masa." CNN, 02 Okt.2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230927172129-617-1004541/golongan-putih-di-pemilu-dari-masa-ke-masa> diakses pada kamis, 6 juni 2024 pukul 19.00

Points scored



Dengan data yang ada bisa disimpulkan bahwasannya proses pemilu yang terjadi masih banyak yang tidak melakukan pemilihan atau tidak berpartisipasi dalam pemilu meskipun persentase masih kecil tetapi ini sudah cukup mengkhawatirkan dimana hal ini bisa menurunkan rasa demokrasi dan kurangnya rasa peduli masyarakat kepada jalannya pemerintahan atau konstitusi yang ada terlebih di tahun 2014 dimana mencapai titik tertinggi yaitu 30% masyarakat tidak melakukan pemilihan dalam pemilu presiden begitupun dengan pemilu legislatif dimana masyarakat memilih calon wakil-wakilnya yang menyuarakan suara mereka masih cukup banyak masyarakat yang kurang mau berpartisipasi dalam pemilihan mungkin itu mereka yang kurang mempercayai calon-calonnya ataupun kurangnya edukasi untuk kesadaran politik tersebut atau mulai banyaknya masyarakat atau sering disebut dengan pemilih yang sadar bagaimana mereka hanya mendapatkan sebuah janji manis Ketika dilakukannya sebuah kampanye oleh para calon -calon pemimpin oleh karena itu Hal ini lah sebenarnya yang terpenting untuk partai politik melakukan perubahan dalam membangun demokrasi bagaimana mereka bisa membuat masyarakat turut berpartisipasi dalam salah satu perwujudan demokrasi ini dengan bisa memposisikan bagaimana tipe dari pemilih yang akan mereka pengaruhi.

Partai politik sendiri menggunakan sebuah mobilisasi untuk menarik sebuah perhatian dan mencari sebuah dukungan untuk pemilihan dan hal ini adalah sebuah kinerja dari parpol itu sendiri bagaimana Ada beberapa cara untuk melakukan mobilisasi yaitu dengan teknik *canvassing* dengan cara partai politik harus melakukan berhubungan dengan para masyarakat atau para pemilih dan melakukan suatu pengaruh untuk mereka

lebih mau melakukan pemilihan⁷. pada zaman ini partai politik melakukan mobilisasi sering dengan menggunakan media sosial untuk melakukan suatu perhatian masyarakat dengan perkembangan teknologi yang ada banyak sekali parpol yang sudah menggunakan beberapa cara mulai dari kampanye, pendekatan langsung ke masyarakat, dll tetapi hal ini bisa menjadi suatu pandangan dua sisi yaitu menjadikan hal yang memberikan manfaat atau tidak, bisa menjadi tidak bermanfaat jika yang dilakukan hanya untuk menarik kepentingan dari partai tersebut untuk sesuatu hal. Jadi apakah hanya partai politik saja yang bisa memobilisasi masyarakat? Apakah bisa dengan cara lain diluar politik, mereka bisa memobilisasi masyarakat di luar partai politik bisa melalui organisasi sosial agama dan mengenai isu gender untuk melakukan suatu pengaruh kepada masyarakat itu sendiri, bisa juga melalui jaringan kerja, keluarga, dll. guna dari memobilisasi ini merupakan untuk masyarakat bisa lebih memahami dan mengerti dan bisa terwujudnya suatu demokrasi dalam negara.

Dari hal ini kita bisa melihat bahwa partai politik merupakan suatu pengaruh besar dalam menjalankan demokrasi yang sedang terbangun bagaimana jika mereka melakukan sesuai dengan struktur dan fungsi terlebih ideologi yang ada begitu banyak masyarakat yang akan turut berkontribusi dan lebih berpartisipasi dalam hal politik dan negara sebagaimana sesuai dengan teori demokrasi itu sendiri bahwa kedaulatan berada di tangan masyarakat. Jadi sudah sepatutnya Lembaga-lembaga yang berwenang terlebih parpol untuk tidak mementingkan suatu kepentingan mereka sehingga masyarakat bisa tertarik. Hal lain yang akan dibahas mengenai suatu perwujudan dari bagaimana suatu partai politik bisa mempengaruhi jalannya demokrasi yang ada di Indonesia itu sendiri

Kualitas Pemimpin yang Direkrut Dalam Partai Politik

satu dari beberapa ciri dan syarat terpenting negara demokrasi zaman modern adalah terselenggaranya pemilihan umum, yaitu pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan hal ini dengan Deklarasi Internasional tentang Demokrasi yang diadopsi di Kairo pada 16 September 1997. Deklarasi ini menekankan bahwa bagian tak terpisahkan dari demokrasi adalah menyelenggarakan pemilu yang adil dan tidak memihak. Sebagai negara demokrasi, Indonesia mempunyai kemampuan untuk dapat memilih wakil rakyat dalam suatu badan legislatif. Pemilu merupakan metode yang dipakai oleh berbagai negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, untuk merekrut anggota legislatif. Dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi dan mempunyai hak untuk menyatakan suaranya lewat pemilu (pemilihan umum) dengan tujuan menentukan wakilnya dalam majelis rakyat.

Menurut Almond, konsep partisipasi politik paling baik digambarkan sebagai mengundang anggota dari budaya yang berbeda, seperti kelompok agama, kelas sosial,

⁷Nugroho Kris, *Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai dalam Mobilisasi Politik Elektoral*, vol 24, Journal Unair, 2011, hal 6

dan kelompok etnis, dan kemudian melibatkan mereka dalam peran tertentu dalam proses politik. Proses ini mencakup pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan komunikasi politik, nilai-nilai, harapan, dan pengaruh intelektual. Berdasarkan prosedur yang dijelaskan oleh Almond dan Powell, dapat dipastikan bahwa DPD menggunakan metode rekrutmen masyarakat. Proses ini dapat diikuti oleh siapa saja dan diumumkan kepada publik oleh siapa saja yang mendaftar sebagai calon sah.

Menurut Sahid, proses rekrutmen mempunyai tiga ciri: Top-down, yaitu perekrutan politik yang asalnya dari pejabat yang tengah menduduki jabatan, seperti penunjukan secara privat serta seleksi penetapan. Bottom-up, yaitu perekrutan politik yang bersumber dari kalangan masyarakat, seperti individu yang mendaftar untuk menduduki jabatan. Contohnya adalah seseorang yang mendaftar ke parpol (partai politik) untuk menjadi calon anggota legislatif atau kandidat pemimpin daerah. Mix, yaitu proses penentuan yang menggabungkan model top-down dan bottom-up. Contohnya adalah proses pemilu (pemilihan umum) bagi executive maupun legislative.

Dalam kenyataannya, pada proses perekrutan calon legislatif, muncul banyak nama yang diajukan oleh partai politik, termasuk sejumlah pelaku dunia hiburan yang dikenal luas oleh masyarakat. Partai Nasional Demokrasi keluar sebagai partai yang memiliki jumlah calon legislatif dari lingkungan selebritas paling banyak, yaitu 27 individu. Diikuti oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 13 calon, Partai Kebangkitan Bangsa dengan 7 calon, dan Partai Berkarya dengan 5 calon. Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Persatuan Indonesia masing-masing memiliki 3 calon. Partai Amanat Nasional, dan Partai Golongan Karya masing-masing memiliki 4 calon legislatif dari kalangan selebritas, sementara Partai Solidaritas Indonesia memiliki 1 calon legislatif dari kalangan selebritas. Walaupun bukan termasuk trend baru, keikutsertaan selebritas pada kontestasi politik praktis masih diminati untuk dibahas.

Tidak terdapat parpol (partai politik) yang daftar kandidat anggota parlemennya yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum tidak mencantumkan nama-nama beken dari dunia seni dan olahraga. Ini bukanlah fenomena baru, namun sudah ada sejak zaman Pemerintahan Soeharto, bahkan mungkin sejak zaman Pemerintahan Soekarno. Misalnya, ada 39 selebriti yang mengikuti pemilu parlemen 2014-2019, termasuk 15 orang Senayan dan tiga anggota dewan perwakilan daerah. Banyak nama tenar, mulai dari penyanyi, aktor, hingga mantan model yang ambil bagian di Partai NasDempada pemilu 2019-2024. Ada banyak nama. Partai yang dipimpin Surya Paloh juga dikenal dengan 'politik non-blok' selama tiga tahun terakhir dan telah menarik banyak politisi yang membelot ke partai lain karena berbagai alasan mulai dari kurangnya kohesi, perselisihan internal, kepemimpinan otoriter hingga sentimen perbedaan pendapat. Ada juga rumor bahwa gerakannya diminggoda. Tampaknya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah satu-satunya lembaga perekrutan resmi yang melakukan tes terhadap para kandidat, termasuk wawancara asing. Pelamar ditinjau tidak hanya untuk persyaratan

administratif tetapi juga untuk kompetensi dan integritas ilmiah. Artis Giring Ganesha teladan Nidji terpilih menjadi presenter pada 5 November 2017. Setelah memutuskan terjun ke dunia politik, ia mengikutikelas di universitas, mengikuti berbagai kelas politik, kursus singkat, dan kursus public speaking. Saat bertemu dengan anggota dewan yang lain, ia sudah mengetahui apa yang hendak diperjuangkannya, yakni di ranah education. Giring mendefinisikan topik-topik seperti pendidikan budaya, kebudayaan dan kewarganegaraan.

Akhirnya banyak yang menggunakan jalan pintas. Selama mereka terkenal, punya koneksi, dan punya uang, mereka bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Soal kompetensi dan integritas, itu pertanyaan selanjutnya. Faktanya, memilih calon anggota parlemen berdasarkan popularitas atau kekayaan terbukti membahayakan negara. Setelah menjabat di parlemen, seringkali mereka melupakan tujuan dari wakil rakyat itu sendiri, bahkan terkadang menjadi musuh yang mengkhianati masyarakat. Shanya ada satu cara untuk mewujudkan lembaga legislatif yang baik dan benar-benar mewakili rakyat adalah melalui calon legislatif yang berintegritas. Dalam rekrutmen calon anggota parlemen partai politik, digunakan metode rekrutmen tertutup, berbeda dengan metode rekrutmen pada umumnya. Hal ini terlihat dari praktiknya dan belum diketahui masyarakat. Dengan bertindak sebagai elit pembangunan dalam dirinya sendiri, partai menghilangkan kesempatan perusahaan untuk mengevaluasi potensi elit yang ditampilkan, sehingga menjadikannya tidak kompetitif. Hal ini memungkinkan demokrasi berfungsi sebagai mekanisme elitis untuk reformasi legitimasi. Selain itu, sistem ketenagakerjaan tidak berfungsi seperti seharusnya, karena anggota party dipindahkan ke party lain selaku calon anggota parlemen tanpa memperhitungkan pekerja yang telah membangun partai selama bertahun-tahun.⁸

Peran Partai Politik Dalam Menanggapi Kebijakan Publik

parpol (Partai politik) memiliki peran penting pada tugas menanggapi kebijakan publik. Berikut adalah beberapa aspek peran partai politik terkait dengan kebijakan publik:

Pengatur kebijakan

Peran utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk melaksanakan program berdasarkan ideologi partai. Tanggung jawab partai politik adalah: 1. Policy Coordination 2. Policy Intergration 3. Policy Development 4. Political Communication 5. Political Contol 6. Conflict Management 7. Political Participation. Dalam hal partisipasi politik, warga negara dapat mempengaruhi proses penciptaan dan penerapan public policy lewat pemilihan wakil serta pemimpinya.

⁸Reny Heronia Nendissa dan Claudio Patrick I Rahakbauw, “Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Legislatif”, SASI, Volume 26 Nomor 1, Januari-Maret 2020, 119–126

Public Policy merupakan kekuasaan yang diciptakan oleh Kewenangan otoritas pada sistem pemerintahan, dimana keputusan akhir ditegaskan dalam kebijakan dan pegawai pemerintah harus bertindak. Kebijakan pemerintah memegang peranan penting dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang benar. Namun acap kali kebijakan tersebut tak memihak pada kepentingan masyarakat dan menguntungkan pihak tertentu. Oleh karena itu, kebijakan publik yang diusulkan pemerintah hendaknya memihak rakyat dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Partai politik menjadi pengambil keputusan berdasarkan Pasal 11(1)(c) UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008; di sini partai politik berperan sebagai sarana untuk merumuskan dan mengkoordinasikan tuntutan politik 'warga negara'. Penerapan bentuk pemerintahan. kebijakan; . Menurut aturan ini, partai politik lebih cenderung mengutamakan kepentingan partai dalam sistem pemerintahan. Kebijakan yang diambil baik oleh lembaga legislatif maupun eksekutif sangat dipengaruhi oleh partai politik yang seringkali tidak mendukung nilai-nilai demokrasi. Undang-undang yang mengatur partai politik sebagian besar bersifat politis karena partai politik tidak dapat menentukan arahnya secara jelas dalam membuat kebijakan. Kebijakan pemerintah tak mungkin langsung dilaksanakan tanpa adanya tanggapan pihak.

Peran partai politik sangat penting dalam menentukan negara dan arah pembangunannya. Jika kebijakan diambil sebagai hasil dari suatu partai politik, maka partai tersebut harus mendukung dan mempertahankan kebijakan yang merupakan kepentingan publik.⁹

Pengusung Kepentingan Rakyat

Partai politik memainkan peran penting dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan adanya representasi yang baik dalam pemerintahan. Salah satu bukti peran partai politik sebagai pengusung kepentingan rakyat adalah dengan diadakannya pemilu, Partai politik berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu yang aspiratif dan demokratis. Melalui pemilu, partai politik memilih calon-calon yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Di tengah perhatian global terhadap demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum yang memiliki nuansa demokrasi menjadi syarat penting untuk membentuk leadership yang sah. Pemilihan umum berfungsi untuk menciptakan leadership yang mencerminkan keinginan masyarakat dalam bangsa yang demokratis, sehingga pemilu juga menjadi alat pengakuan yang sah terhadap Power.

Agar pemilihan umum bisa dianggap mampu menginspirasi serta berjalan secara

⁹ Ridwan, "KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PUSARAN PARTAI POLITIK", JOURNAL OF POLITICS AND DEMOCRACY STUDIES, Vol.3 No.1 Tahun 2022, 71-72

demokratis, beberapa persyaratan harus dipenuhi di antara lain adalah: Pemilihan umum wajib bernuansa competitive, dengan kandidat yang tanpa intervensi dan mandiri. Lalu, pemilihan umum harus dilaksanakan secara continue, serta interval waktu yang jelas. Kemudian, pemilu harus inklusif, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi, tanpa diskriminasi. Kemudian, pemilih wajib diberikan keleluasaan untuk dapat menentukan serta mendiskusikan pilihan mereka tanpa tekanan, dengan akses informasi yang luas. Kelima, pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang independen dan tidak memihak.¹⁰

Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik untuk Generasi Muda dan Dampaknya terhadap Ketahanan Politik Wilayah

Salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada pegawainya dan masyarakat sekitar. Di sisi lain, generasi muda berperan penting sebagai penggerak perubahan dan demokrasi. Pertanyaannya adalah bagaimana partai politik dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat, khususnya generasi muda, yang pada akhirnya dapat berdampak pada resistensi politik.

Peran parpol (partai politik) pada pemberian political education terhadap buruh dan public masih kecil. Metoda dan alat political education yang bersumber dari parpol (partai politik) sebagian besar bersifat ideologis dan tidak praktis. Proses evaluasi pada pelaksanaan political education tak berjalan seperti yang diharapkan karena masyarakat tidak mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Akibatnya, kualitas penggawa partai politik yang mendorong perbaikan taraf hidup orang pun menurun. Dampak dari peran partai politik dalam pendidikan politik generasi muda dalam konfrontasinya dengan politik di daerah memiliki dampak terhadap keikutsertaan politik publik dalam partisipasi dan partisipasinya dalam perumusan dan pengawasan kebijakan pemerintah..¹¹

Transparansi dan yang dilakukan partai politik (bagaimana penggunaan dana kampanye dan kegiatan partai politik)

Partai politik memiliki posisi yang penting di negara-negara demokrasi guna kelanjutan demokrasi di suatu negara yang dikombinasikan dengan pemerintahan yang berkuasa. Sebagai organisasi politik, partai politik membawa peran yang sangat penting

¹⁰ Muslih, Andre Pebrian Perdana, Dan Kamal Fahmi Kurnia, "PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU YANG ASPIRATIF DAN DEMOKRATIF", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 01 September 2021, 181

¹¹ Yulianto Dwi Saputro dalam Chandra Lesmana, Karim Suryadi, dan Leni Anggraeni "Partai Politik sebagai Utilitas Publik dalam Demokrasi di Indonesia", *PUBLISITAS : Journal of social Science and Politics*, Vol. 8No. 1 Oktober 2021

guna kestabilan politik dan kelanjutan sistem di suatu negara. Dalam hal ini setiap partai politik biasanya melakukan kampanye untuk mengajak masyarakat agar memilih calon-calon anggota yang akan diangkat menjadi anggota legislatif. Untuk melakukan kampanye tentukan memerlukan biaya yang tidak sedikit, mereka memerlukan dana baik itu dari kas partai politik itu sendiri, APBN/APBD ataupun dana dari para donator.¹²

Berdasarkan Pasal 15 huruf d UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, manajemen dan pemanfaatan bantuan keuangan dari negara untuk partai politik harus disampaikan secara terbuka. PP Nomor 1 Tahun 2018 mengubah PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menetapkan bahwa partai yang mendapat bagian di DPR pusat menerima Rp1.000/suara, di DPRD provinsi Rp1.200 sedangkan kabupaten/kota Rp1.500/suara. Pengelolaan keuangan partai politik penting karena dana tersebut berasal dari APBN/APBD yang dibayarkan oleh masyarakat melalui pajak. Masyarakat perlu mengetahui penggunaannya guna membangun kepercayaan masyarakat kepada partai politik.¹³

Dalam sebuah kampanye perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yaitu keterbukaan. Akuntabilitas dana kampanye partai politik dan calon legislatif merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta pemilu mengimplementasikan nilai demokrasi yang diharapkan oleh seluruh elemen negara. Transparansi dan akuntabilitas penting untuk mencegah praktik politik uang dalam pemilu agar tercipta demokrasi yang bersih di Indonesia. Namun transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye masih belum maksimal dilaksanakan karena belum menjadi kebiasaan di negara kita ini. transparansi dan akuntabilitas dalam laporan dana kampanye adalah elemen yang krusial dalam proses demokrasi, nyatanya masih banyak partai politik yang tidak melaporkan dananya secara faktual.¹⁴

Laporan keuangan dana kampanye adalah hal krusial dalam sebuah demokrasi. Parpol sebagai harus bertanggungjawab taat dan transparan guna meminimalisir penyalahgunaan dana kegiatan kampanye agar publik tidak curiga. Isi laporan dana

¹² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar "Hukum Partai Politik"*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 1.

¹³ Thariq Alfian dkk, "Konsep Good Governance Dalam Transparansi Anggaran Dana Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah", (Surabaya: *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4(1) 2024), hlm. 26.

¹⁴ Bayu Nurcahyo Andini, Frenqui Monteiro dan Soebandi, "Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye:(Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo)", (Surabaya: *Media Mahardhika* 17(1) 2018) hlm. 28.

kampanye haruslah kualitatif, dapat dipahami, dibandingkan dan relevan.¹⁵ Transparansi diperlukan dalam penggunaan dana publik pada partai politik sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-Undang dan UU pemilu. Laporan ini harus diaudit serta terbuka untuk publik.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengharuskan Parpol untuk memberitahu dana kampanye, termasuk Laporan Awal Dana Kampanye. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 334 UU No. 7 Tahun 2017, dengan rincian implementasi dijelaskan dalam Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu. Peraturan ini mencakup kewajiban membuka Rekening Khusus Dana Kampanye, pedoman penyusunan LADK, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, tenggat waktu pelaporan, pedoman Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye, serta pedoman mekanisme audit atas laporan dana kampanye.¹⁶ Didalam LADK harus mencakup saldo awal RKDK, penerimaan sumbangan partai politik, pihak ketiga, caleg juga saldo akhir hasil penerimaan dan pengeluaran sebelum serta setelah pembukaan RKDK.¹⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan aktivitas keuangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan RKDK. Menurut PPATK, kampanye pemilihan presiden dan legislatif 2024, terjadi peningkatan transaksi keuangan di rekening bendahara partai maupun rekening pribadi caleg secara signifikan. Selain itu temuan lainnya adalah transaksi mencurigakana dari 100 caleg dengan total nilai Rp51 triliun.¹⁸

Bersumber pada siaran pers KPU pada 14 Januari 2024 lalu, mayoritas partai politik yang ikut aktif dalam pemilu telah menyerahkan perbaikan LADK pada 12 Januari 2024. Hanya Perindo dan PKB yang mengajukan lebih awal yaitu pada tanggal 10 dan 11 Januari 2024. Terdapat 3 partai politik yaitu Partai Gelora, PPP dan PSI yang status LADK nya belum sesuai dan lengkap, 15 partai lainnya telah berstatus lengkap dan sesuai. Partai Golkar melaporkan penerimaan sebesar Rp. 10.018.314.565, turun dari Rp. 10.197.613.902, dengan pengeluaran yang tetap. Selanjutnya PKS melaporkan perubahan pengeluaran dari Rp. 7.833.307.791 menjadi Rp. 8.243.335.838. PAN melaporkan

¹⁵ Nur Sayidah dan Suryanti Mandasari, "ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DI KPU JAWA TIMUR", (Kediri: *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)* 4(2) 2023).

¹⁶ Rais Agil Bahtiar, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengungkapan Dana Kampanye Pemilu", https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-2-II-P3DI-Januari-2024-1982.pdf diakses pada tanggal 06 Juni 2024, hlm. 7

¹⁷ Indonesia Corruption Watch, "Pura-pura Terbuka: Menyingkap Kepalsuan Laporan Dana Kampanye Parpol", <https://antikorupsi.org/id/pura-pura-terbuka-menyingkap-kepalsuan-laporan-dana-kampanye-parpol> diakses pada 06 Juni 2024

¹⁸ Rais Agil Bahtiar, *Op.Cit.* hlm 6

penerimaan sebesar Rp. 29.821.500.000, sedikit turun dari Rp. 29.822.500.000. Laporan penerimaan dan pengeluaran PSI mengalami peningkatan dari Rp. 2.002.000.000 menjadi Rp. 33.052.522.406 dan dari Rp. 180.000 menjadi Rp. 24.130.721.406. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi kecurangan dan ketidakjujuran partai politik dalam mengajukan perbaikan LADK kepada KPU.¹⁹

Saat ini, peraturan dalam pengungkapan dana kampanye di Indonesia masih memiliki kekurangan. Dalam UU pemilu terdapat aturan tentang batas maksimal dana kampanye yang dapat disumbangkan, namun didalamnya tidak diatur mengenai jaminan pencatatan setiap sumbangan yang diketahui oleh penyelenggara pemilu. Hal ini menjadi sebuah kekurangan dikarenakan para kandidat dapat menerima bantuan dana kampanye dari oknum anonim tanpa teridentifikasi. Selanjutnya, Laporan dana kampanye seperti LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak merefleksikan keakuratan fakta keuangan kampanye kandidat yang ada karena hanya berisi informasi umum tanpa menyertakan informasi fundamental darimana dana itu berasal dan penggunaannya dilapangan. Laporan-laporan ini sering disepelekan, mereka menganggap laporan ini hanya sebatas formalitas untuk menghindari sanksi yang ada, bahkan keuangan yang dilaporkan pun tidak sesuai dengan jumlah dana sebenarnya yang dikeluarkan.²⁰ Selain itu audit dana kampanye tidaklah bersifat investigatif tanpa melibatkan penilaian yang menyeluruh. Potensi pelanggaran juga tidak terjadi di pelaporan saja, dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik oleh KPU juga terdapat potensi pelanggaran.²¹

Studi Kasus

PDI Perjuangan merupakan parpol yang mempunyai sebuah suatu hubungan dengan ideologi marhaenisme yang dimana merupakan suatu ide atau gagasan dari politik Soekarno hal tersebut karena diambil dari suatu Sejarah yang dimana menurunkan politik dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang menganut politik nasionalisme dan politik Soekarno, partisipasi PDIP terhadap pemilu yang dimulai dari tahun 1999—2024 termasuk dalam suatu partai yang cukup stabil dan telah maju, hal tersebut bisa dilihat dari hasil perolehan suara dalam pemilu legislatif sebagai berikut²²:

¹⁹ Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*

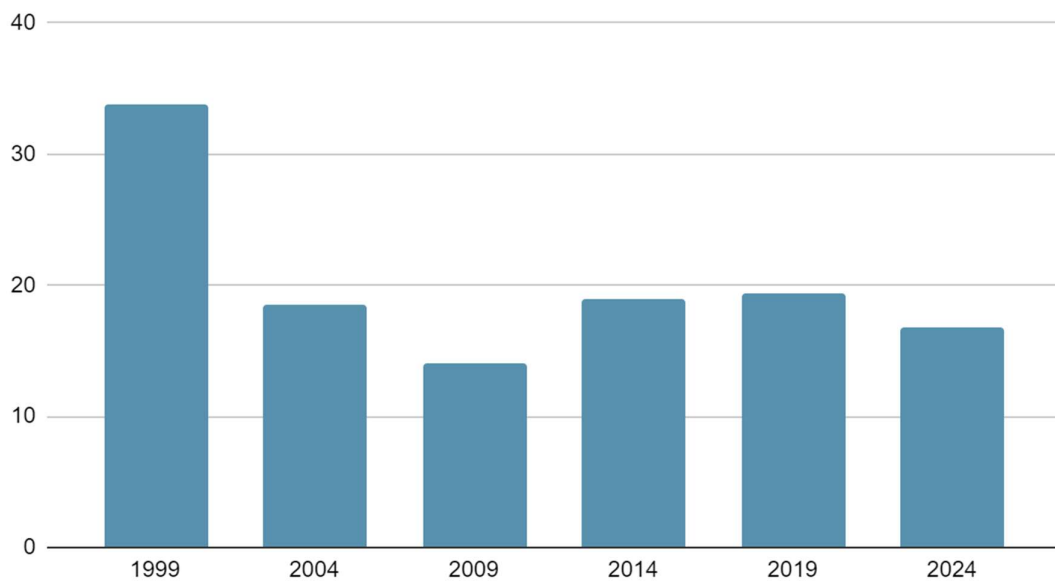
²⁰ Rais Agil Bahtiar, *Op.Cit.* hlm. 7

²¹ *Ibid.* hlm. 8

²²Viva Budi Kusnandar, "Perbandingan Perolehan suara PDI Perjuangan Sejak Pemilu" 1999-2019".databoks,14 juni 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/14/ini-perbandingan-perolehan-suara-pdi-perjuangan-sejak-pemilu-1999-2019> diakses pada 6 pukul 15.00

Tahun Pemilu	Presentase Hasil Perolehan PDI Perjuangan
1999	33,75
2004	18,53
2009	14,01
2014	18,96
2019	19,33
2024	16,72

Points scored



Dengan perolehan suara diatas mengartikan bahwa masyarakat dapat menentukan

PDIP sebagai partai yang nasional yang mempunyai prinsip politik kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hal ini juga diatur dalam Anggaran Dasar PDIP pada tahun 2015—2020, Pasal 5 yang berbunyi jiwa dari partai tersebut merupakan kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam kaderisasi yang dilakukan partai tersebut melalui DPC, DPD, DPP PDIP selalu dilakukan dalam kurun waktu 4—6 bulan, kaderisasi tersebut guna untuk melatih anggota dan yang bisa mewujudkan PDIP sebagai pengurus dengan ideologi dari partai. Kaderisasi yang digunakan oleh partai tersebut guna untuk menjunjung tinggi ideologi mereka²³. Kaderisasi juga merupakan tempat untuk menyeleksi dan melatih anggota partai supaya taat kepada ideologi nya, hal tersebut membantu suatu partai supaya bisa lebih Bersatu dan mempunyai tujuan yang sama untuk keberhasilan dari parpol dalam pemilu dan kekuasaan. Ada sebuah pemahaman teori politik yang dimana jika suatu partai tidak berpegang teguh pada prinsip nya maka akan timbul suatu masalah yang terjadi. Yang bisa membuat suatu keraguan dan tidak puas nya para pendukung karena merasa ditipu oleh partai tersebut. Dan mampu mempengaruhi banyak hal-hal lain, hal ini juga mempengaruhi partai terhadap suatu tekanan dari luar dan membatasi suatu kemampuan untuk mewakili kepentingan pendukung mereka²⁴. Oleh karena itu partai sangat penting menjunjung suatu prinsip atau ideologi mereka sebagai menjaga kepercayaan dan dukungan dari pendukungnya.

Tetapi hal ini juga bisa menjadikan suatu dampak negatif bagaimana mereka hanya ingin untuk melakukan pengaruh terhadap suara atau dukungan terhadap partai. Sesuai dengan pendapat Muchtar mengatakan bahwa kegiatan politik sekarang hanya terpusat pada suatu kompetisi atau kursi dalam kendali di pemerintahan, dan mengapa partai politik sangat ingin di pemerintahan, Ketika parpol sudah berada di pemerintahan dan berkuasa maka ia mampu menjalankan program dan prinsip yang sudah dibangun oleh mereka. Yang menjadikan bagaimana menjadikan keinginan parpol untuk memegang kekuasaan.

Sebagaimana seharusnya yang menjadikan suatu tujuan diadakannya partai politik untuk membantu masyarakat paham akan politik yang ada dan untuk membantu mereka dalam mewakili setiap suara yang ada namun nyatanya masih banyak yang parpol tidak melakukan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, mereka hanya mementingkan suatu kepentingan kekuasaan dan kepentingan yang ada untuk memajukan partai mereka. Padahal parpol mempunyai suatu hubungan yang erat terhadap demokrasi yang sedang terbangun dalam negara kita. Begitupun yang terlihat dalam partai PDIP bagaimana Ketika awal mulanya mereka bisa membuat suatu partai yang bisa memikat warga karena sesuai dengan nasionalis namun Ketika partai tersebut sudah tidak sesuai dengan apa yang

²³ Danuwidjaja Arfan F, Manan Firman, "Hubungan Antara Kaderisasi dan Ideologi dalam Partai Politik Studi Kasus Aktivitas Internal PDIP" Indonesian Journal of Social and Political Sciences Volume 4, No.1, April 2023, hal.44

²⁴ Ibid hal.46

menjadi ideologi mereka Ketika sudah memiliki kekuasaan dan sudah tidak lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya maka masyarakat pun mulai hilang dan enggan untuk berkontribusi dan hilangnya suara terhadap pemilihan tersebut.

Oleh karena itu baiklah seharusnya partai untuk melakukan suatu kegiatan politik yang memebangun masyarakat untuk percaya bahwa partai melakukan suatu penampung aspirasi mereka dan mewakili akan suara mereka terhadap suatu jalannya pemerintahan dan bukan menjadikan suatu partai untuk kepentingan individu-individu yang ada dan mencoba untuk melakukan suatu transparansi kepada public dengan program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna untuk mengembalikan suatu kepercayaan terhadap masyarakat yang mempunyai pemikiran kritis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pendapat Kevin Boyle dan David Beetham demokrasi adalah wujud keinginan masyarakat luas, dimana setiap orang memiliki hak yang sama dan menjadikan demokrasi sebagai indikator prinsip kendali rakyat dengan kesetaraan politik, yang diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan Keputusan secara kolektif. Pada era kolonial, partai-partai dibentuk untuk mencari identitas nasional bersamaan dengan memperjuangkan kemerdekaan, sedangkan pada era kebangkitan nasional yang menjadikan dasar pembentukan partai karena adanya ideologi seperti Islamisme, Nasionalisme, dan Marxisme. Partai politik merupakan salah satu pilar berhasilnya negara demokrasi. Hal tersebut akan efektif apabila partai politik dan masyarakat menjalankan peran serta tanggung jawabnya secara Bersama . Menurut Herbert Feith, partai merupakan aktor utama dalam sistem politik Demokrasi Parleментар.

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan: "partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kebebasan berserikat dan berekspresi merupakan cerminan parpol yang dilindungi konstitusi dalam demokrasi konstitusional dan menjadi bagian fundamental dalam pembentukan hukum yang demokratis.²⁵

Partai politik memainkan peran penting dalam jalannya demokrasi di suatu negara, peran mereka sangat krusial dalam menentukan arah tujuan pembangunan negara.

²⁵ I Gede Wijaya Kusuma, Ida Ayu Putu Widiati dan Luh Putu Suryani, "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat", (Bali: *Jurnal Konstruksi Hukum* 1(1) 2020), hlm. 165

Kebijakan yang diambil sebagai suatu hasil partai politik harus dijalankan, mendukung dan mempertahankan kebijakan tersebut dengan mengutamakan kepentingan publik guna kesejahteraan masyarakat luas. Para legislative tersebut harus memperjuangkan kepentingan rakyat, memastikan adanya representasi yang baik dalam pemerintahan, dengan menampung dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Partai politik memerlukan kampanye untuk mempromosikan dan mengenalkan partai serta calon legislatif mereka, dana yang diperlukan untuk kampanye tersebut tidaklah sedikit. Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye untuk menghindari penyelewengan dana serta memberikan keterbukaan kepada masyarakat tentang alokasi dana tersebut karena masyarakat memiliki peran didalamnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat masyarakat.

Dalam realita dilapangan masih banyak partai politik yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat luas, hal tersebut menjadi tantangan bagi negara kita kedepannya. Disini pendidikan politik memiliki peran penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga para pelaku demokrasi. Seluruh masyarakat harus ikut aktif memainkan peran mereka masing-masing untuk kelangsungan, kemajuan bangsa dan negara. Melalui pendidikan politik yang menyeluruh, masyarakat dapat memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi, mengawasi dan menilai kinerja partai politik serta calon pemimpin dalam pemerintahan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Pendidikan politik tidak hanya menjadi instrumen untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keterlibatan yang berkelanjutan dalam upaya memperkuat demokrasi dan mencapai keadilan sosial.

DAFTAR REFERENSI

Jurdi, Fajlurrahman. (2020). Penghantar Hukum Partai Politik. Prenada Media.

Alfan, T., Umam, K., Anwar, I. F., & Qomaruzzaman, A. (2024). Konsep Good Governance Dalam Transparansi Anggaran Dana Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasa. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(1), 17-35.

Andini, B. N., Monteiro, F., & Soebandi, S. (2018). Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye:(Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo). *Media Mahardhika*, 17(1), 25-45.

Bahtiar, Rais Agil. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengungkapan Dana Kampanye Pemilu". 2024. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-2-II-P3DI-Januari-2024-1982.pdf diakses pada tanggal 06 Juni 2024, hlm. 7

Danuwidjaja Arfan F, Manan Firman, "Hubungan Antara Kaderisasi dan Ideologi dalam Partai Politik Studi Kasus Aktivitas Internal PDIP" *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* Volume 4, No.1, April 2023

.Fadjar Abdul M, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia* (Malang:Setara Press,2012), hal.12-14

Haris Syamsuddin, *Partai, Pemilu, dan Parlemen* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014) hal. 20-21

Hj.Naafisah Didah D,*Teori-Teori Demokrasi* (Bandung:CV Pustaka Setia,2013),hal.21-22

Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 164-169. Bali hlm. 165

Muslih, Perdana, A. P., Dan Kurnia, K.F., (2021). PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU YANG ASPIRATIF DAN DEMOKRATIF, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 181

Nendissa, R. H., dan Rahakbauw, C. P. I. (2020). Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Legislatif”, *SASI*, 26(1), 119–126

Nugroho Kris, *Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai dalam Mobilisasi Politik Elektoral* , vol 24, *Journal Unair*,2011,hal 6

Ridwan, (2020), *KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PUSARAN PARTAI POLITIK. JOURNAL OF POLITICS AND DEMOCRACY STUDIES*, 3(1), 71-72

Saputro, Y. D. , dalam Lesmana, D., Suryadi, K., dan Anggraeni, L. (2021). Partai Politik sebagai Utilitas Publik dalam Demokrasi di Indonesia. *PUBLISITAS : Journal of social Science and Politics*,. 8(1)

Sayidah, N., & Mandasari, S. (2023). ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DI KPU JAWA TIMUR. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 188-201.

Viva Budi Kusnandar,” Perbandingan Perolehan suara PDI Perjuangan Sejak Pemilu” 1999-2019”.*databoks*,14 juni 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/14/ini-perbandingan-perolehan-suara-pdi-perjuangan-sejak-pemilu-1999-2019> diakses pada 6 pukul 15.00

Indonesia Corruption Watch. “Pura-pura Terbuka: Menyingkap Kepalsuan Laporan Dana Kampanye Parpol”. 2024. <https://antikorupsi.org/id/pura-pura-terbuka-menyingskap-kepalsuan-laporan-dana-kampanye-parpol> diakses pada 06 Juni 2024

“ ‘Golongan Putih’ di Pemilu dari Masa ke Masa.”*CNN*, 02 Okt.2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230927172129-617-1004541/golongan-putih-di-pemilu-dari-masa-ke-masa> diakses pada kamis, 6 juni 2024 pukul 19.00